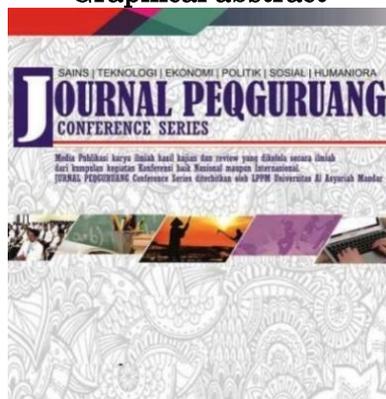


Graphical abstract



PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR JALAN UNTUK MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI KECAMATAN ULUMANDA

¹Sadikin, ²Sjuaib Hannan, ³Ulya Sunani
^{1,2,3}Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu-ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan, Universitas Al Asyariah Mandar.

Corresponding email

sadikin@gmail.com

Abstract

The purpose of this study was to determine the role of the Regional Government in the development of road infrastructure and to determine the factors that support and hinder the role of the Regional Government in the development of road infrastructure in improving the welfare of the community in Ulumanda District, Majene Regency. This study used qualitative research methods. Data collection techniques through observation, interviews and documentation studies. Data were analyzed by data reduction techniques, data presentation, and drawing conclusions. The results of the study revealed that the local government of Majene Regency, Ulumanda sub-district has carried out its role in accordance with Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government. This can be seen from the role of the Public Works Office of Majene Regency, Ulumanda sub-district in carrying out road construction which is also adjusted to the 2018 Regional Development Work Plan (RKPD) made by BAPPEDA leading to the second phase of the Regional Long-Term Development Plan (RPJPD) (2018-2023).) Majene Regency, Ulumanda sub-district. However, based on the results of research through interviews, there are still several indicators that have not run optimally, such as dependence on funds from the center causing the schedule for the preparation of the Regional Development Budget Plan to be inaccurate, because the preparation of regional budgets depends on funds from the center. This causes frequent delays in the preparation of the APBD in road construction. The Public Works Office of Majene Regency, Ulumanda sub-district can improve coordination with the Provincial Government and the Central Government so that it can support the implementation of a good local government role and development activities, especially road infrastructure development, can run effectively, efficiently and on target.

Keywords: *The Role Of Government, Road Infrastructure Development*

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran Pemerintah Daerah dalam pembangunan infrastruktur jalan dan untuk mengetahui faktor-faktor yang mendukung dan menghambat peran Pemerintah Daerah dalam pembangunan infrastruktur jalan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Ulumanda Kabupaten Majene. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan studi dokumentasi. Data dianalisis dengan teknik reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian diketahui bahwa pemerintah daerah Kabupaten Majene kecamatan Ulumanda telah menjalankan perannya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Hal tersebut dilihat dari peran Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Majene kecamatan Ulumanda dalam melakukan pembangunan jalan yang juga disesuaikan dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tahun 2018 yang dibuat oleh BAPPEDA mengarah kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) tahap ke dua (2018-2023) Kabupaten Majene kecamatan Ulumanda. Namun berdasarkan hasil penelitian melalui wawancara, masih ada beberapa indikator yang belum berjalan dengan maksimal, seperti ketergantungan dana dari pusat menyebabkan tidak tepatnya jadwal penyusunan Rencana Anggaran Pembangunan Daerah, karena penyusunan anggaran daerah bergantung kepada dana dari pusat. Hal tersebut menyebabkan masih sering terjadi keterlambatan dalam penyusunan APBD dalam pembangunan jalan. Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Majene kecamatan Ulumanda dapat meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat sehingga dapat mendukung terlaksananya peran pemerintah daerah yang baik dan kegiatan pembangunan khususnya pembangunan Infrastruktur jalan dapat berjalan efektif, efisien dan tepat sasaran.

Kata Kunci : *Peran Pemerintah, Pembangunan Infrastruktur Jalan*

Article history

DOI: <https://dx.doi.org/10.35329/jp.v3i2.2215>

Received : 02 September 2021 | Received in revised form : 21 Oktober 2021 | Accepted : 19 November 2021

1. PENDAHULUAN

Pembangunan adalah sebagai sebuah proses multidimensional yang mencakup berbagai perubahan mendasar atas struktur sosial, sikap-sikap masyarakat, dan institusi-institusi nasional, disamping tetap mengejar akselerasi pertumbuhan ekonomi, penanganan ketimpangan pendapatan, serta pengentasan kemiskinan (Todaro, 2000). Pembangunan juga diartikan sebagai suatu proses perubahan sosial dengan partisipatori yang luas dalam suatu masyarakat yang dimaksudkan untuk mencapai kemajuan sosial dan material.

Singh dan Steinberg (1996) merekomendasikan pembangunan infrastruktur terpadu skala permukiman kota. Oleh sebab itu, perlu adanya studi kebijakan infrastruktur yang mempertimbangkan kriteria dan indikator pembangunan infrastruktur berkelanjutan, berdasarkan kebijakan yang sudah ada dan melakukan umpan balik kepada *stakeholder* untuk menguji hasil kebijakan dari proses metodologi yang digunakan.

Fenomena penting yang berkembang di antara masyarakat transisi adalah kurangnya keseimbangan dalam birokrasi lembaga-lembaga pembuat keputusan politik, dengan struktur-struktur pelaksana kebijakan birokrasi. Birokrasi pada hakikatnya berfungsi untuk mengatur dan melayani masyarakat. Dengan demikian tugas birokrasi itu tidak semata-mata mengatur saja, akan tetapi juga memberikan pelayanan kepada masyarakat (Ahmad Setiawan, 1998).

Melihat sebuah kenyataan pembangunan infrastruktur jalan yang ada di kecamatan Ulumanda cukup memprihatinkan, jika melalui jalan disekitar kecamatan Ulumanda maka terlihat adanya kerusakan disepanjang badan jalan dan juga tidak adanya lampu penerangan disepanjang jalan, artinya bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Ulumanda masih kurang maksimal dikarenakan dengan kondisi jalan yang masih rusak, perlu diketahui bersama bahwa prasarana jalan yang baik sangat mempengaruhi pengembangan perekonomian masyarakat Kecamatan Ulumanda, sehingga hasil bumi masyarakat terkendala dalam pemasaran. Hal ini menuai kritikan masyarakat desa di kecamatan ulumanda, bahkan para pengendara yang melintasi jalan tersebut. Masyarakat beranggapan bahwa pemerintah daerah harusnya menjadikan fokus perencanaan pembangunan melalui Musrenbang Desa/Kelurahan, Kecamatan dan Musrenbang Kabupaten Sampai musrenbang Tingkat Provinsi. Dari data awal melalui observasi lapangan, peneliti melihat perkembangan infrastruktur jalan semestinya menjadi akses jalan prioritas yang merupakan penghubung antara kecamatan Ulumanda dengan akses menuju ibukota Kabupaten dan Provinsi mestinya mendapat perhatian untuk diperbaiki guna mempermudah akses perekonomian masyarakat disekitarnya. Menurut informasi yang didapatkan oleh peneliti, bahwa seringkali diusulkan dalam sebuah rapat-rapat penting yaitu musrenbang desa/kelurahan dari sekian desa di kecamatan Ulumanda, namun sampai pada hari ini belum dapat direalisasikan oleh pihak-pihak yang berwenang (SKPD) yang bertanggungjawab dalam merampungkan hasil usulan kegiatan perencanaan

pembangunan secara khusus pembangunan infrastruktur jalan. Selain itu sarana dan prasarana jalan menjadi sangat penting dalam rangka peningkatan pendapatan, sehingga mampu mensejahterakan masyarakat desa di kecamatan ulumanda kabupaten majene.

Berdasarkan uraian dari latar belakang tersebut diatas, maka peneliti bermaksud melakukan penelitian dengan judul **“Peran Pemerintah Daerah Dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan Ulumanda Kabupaten Majene”**

2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan penelitian kualitatif dengan tipe deskriptif Tipe penelitian deskriptif yaitu suatu tipe penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai data yang ada dilapangan tentang peran pemerintah daerah dalam pembangunan infrastruktur jalan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Ulumanda.

Penelitian kualitatif memiliki karakteristik dengan mendeskripsikan suatu keadaan yang sebenarnya, tetapi laporannya bukan sekedar bentuk laporan suatu kejadian tanpa suatu interpretasi ilmiah serta memahami atau memperoleh pemahaman mengenai fenomena atau gejala yang diangkat untuk diteliti secara mendalam. (radjab mansyur, bahan ajar metode penelitian kualitatif, 2014:18)

Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan selama 2 bulan mulai dari bulan April sampai bulan Mei 2021. Lokasi penelitian ini berada pada Kecamatan Ulumanda Kabupaten Majene.

Jenis dan Sumber Data

Jenis dan Sumber data yang digunakan dalam Penelitian ini dibagi menjadi 2 yaitu :

1. Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung saat melakukan penelitian di lokasi penelitian menggunakan teknik pengumpulan data wawancara kepada pihak-pihak yang dirasa mengetahui permasalahan pokok dari penelitian sehingga nantinya dapat membantu peneliti dalam pengambilan keputusan akhir pada hasil penelitian.
2. Data Sekunder adalah data tambahan yang diperoleh oleh peneliti menggunakan teknik pengumpulan data studi literature yang nantinya dapat digunakan dalam penguatan data primer.

Informan Penelitian

Informan diambil dari orang yang memiliki pengalaman dan pemahaman atau bahkan orang yang juga pelaku yang terlibat langsung dalam pembangunan infrastruktur jalan di Kecamatan Ulumanda Kabupaten Majene. Adapun yang menjadi informan sebagai berikut:

1. Kasubid PU dan Penataan Ruang Bappeda Majene
2. Kasubid Infrastruktur
3. Kasubid Perencanaan dan Pendanaan
4. Seksi Perencanaan Umum

5. Seksi Pembangunan Jalan
6. Camat Ulumanda
7. Kepala Desa Kabiraan
8. Masyarakat Desa

Teknik Pengumpulan Data

1. Teknik Observasi (Pengamatan Langsung)

Penulis mengamati objek yang diteliti dalam hal ini Peran Pemerintah Daerah Dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan Di Kecamatan Ulumanda kemudian mencatat data yang diperlukan dalam penelitian. observasi untuk mengamati Peran Pemerintah Daerah Dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Kecamatan Ulumanda. Teknik ini dilakukan untuk mendeadakan keragu-raguan peneliti pada data yang dikumpulkan karena diamati berdasarkan kondisi nyata di lapangan.

2. Wawancara

Penulis mengadakan wawancara yang bertujuan untuk mendapatkan informasi tentang pembahasan secara lisan antara nara sumber atau responden dengan penulis selaku wawancara dengan cara tatap muka (*face to face*).

3. Dokumentasi

Selain menggunakan tehnik wawancara untuk pengumpulan data juga menggunakan tehnik dokumentasi. Menurut Lexy J. Moleong (2007:163) dokumentasi merupakan cara pengumpulan dengan mempelajari arsip atau dokumen-dokumen yaitu setiap bahan tertulis baik internal maupun eksternal yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

Dari dokumen tersebut dilakukan kajian isi, sehingga diperoleh pemahaman melalui usaha memperoleh karkteristik pesan. Studi dokumen yaitu cara pengumpulan data dan telaah pustaka, dimana dokumen-dokumen yang dianggap menunjukkan dan relevan dengan permasalahan yang akan diteliti baik berupa literatur, laporan tahunan, majalah, jurnal, table dan karya tulis ilmiah.

Teknik Analisis data

Menurut Patta (1980) merupakan proses mengatur urutan data, mengorganisasikan kedalam suatu pola kategorisasi dan satuan uraian dasar untuk menghasilkan dan memperoleh data yang akurat dan objektif sesuai dengan apa yang menjadi tujuan dalam penelitian ini, maka analisis data yang digunakan adalah tehnik analisis data kualitatif dengan cara analisis konteks dari telaah pustaka dan analisis pernyataan dari hasil wawancara dari informan.

Dalam penelitian ini akan diungkap mengenai makna dari data yang dikumpulkan. Dari data tersebut akan diperoleh kesimpulan yang tentatif, kabur, kaku dan meragukan, sehingga kesimpulan tersebut perlu diverifikasi. Verifikasi dilakukan dengan melihat kembali reduksi data maupun display data sehingga kesimpulan yang diambil tidak menyimpang.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Hasil Penelitian ini akan menguraikan seluruh hasil pengumpulan data penelitian tentang Peran Pemerintah Daerah Kabupaten Majene Dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Ulumanda

Peran pemerintah daerah dalam pembangunan infrastruktur jalan

Kepala Daerah dalam hal ini berperan sebagai alat daerah dan alat Pemerintah Pusat. Sebagai alat daerah tugasnya adalah menjalankan hak, kewenangan dan kewajiban Pemerintah Daerah; mewakili daerah di dalam dan di luar pengadilan; serta bersama-sama dengan DPRD membuat Anggaran Pendapatan Daerah atau Peraturan Daerah. Sedangkan sebagai alat Pemerintah Pusat Kepala Daerah mempunyai tugas untuk membina ketentraman dan ketertiban di wilayahnya sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan pemerintah; melaksanakan segala usaha dan kegiatan di bidang pembinaan persatuan bangsa; menyelenggarakan koordinasi atas kegiatan instansi vertikal dan horizontal dengan masing-masing daerah, baik dalam perencanaan maupun pelaksanaan; membimbing dan mengawasi penyelenggaraan Pemerintah Daerah; mengusahakan secara terus-menerus agar segala peraturan perundang-undangan dan peraturan daerah dijalankan oleh Instansi Pemerintah dan Instansi Pemerintah Daerah serta pejabat yang ditugaskan; melaksanakan segala tugas Pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepadanya; serta melaksanakan segala tugas pemerintah yang tidak termasuk tugas instansi lainnya.

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan menunjukkan bahwa dari kebijakan pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan, adapun bentuk-bentuk partisipasi yang diberikan masyarakat yaitu berupa partisipasi tenaga, ide-ide atau pemikiran, partisipasi dalam bentuk harta benda (uang), bahan-bahan material, dan partisipasi dalam bentuk pemeliharaan hasil-hasil pembangunan yang telah dilaksanakan, dapat dikatakan tinggi tingkat partisipasinya, hal ini berdasarkan hasil penelitian kepada semua informan yang ada.

Adapun wawancara yang dilakukan kepada masyarakat yang salah satunya adalah Abd. Malik mengatakan dalam kutipan wawancaranya sebagai berikut:

"bentuk partisipasi masyarakat sudah tinggi karena sudah banyak yang memberi bantuan kepada pemerintah baik dalam bentuk pemeliharaan pembangunan di desa su'kulang ini, Cuman kita lihat belum sepenuhnya masyarakat yang mendukung dengan kita salah satu dari masyarakat yang memberikan bantuan tenaga pada waktu pemerintah mengadakan program pembuatan talut".
(wawancara, 04 Mei 2021)

Dari uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa masyarakat dalam melibatkan diri secara aktif dalam menyukseskan pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan di kecamatan. Ulumanda adalah dalam bentuk tenaga karena masyarakat di kecamatan Ulumanda dikenal dengan sifatnya yang gotong royong atau kerja sama sedangkan partisipasi dalam bentuk lainnya seperti yang sudah dijelaskan di atas.

Kemampuan Pemerintah Melaksanakan Pembangunan

Pembangunan selalu dipahami sebagai upaya untuk memperbaiki kondisi kehidupan masyarakat untuk lebih baik, melalui langkah penapaian pertumbuhan masyarakat, yang tentunya harus dengan menggerakkan masyarakat dalam berpartisipasi seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Selain dari pada itu, dalam pelaksanaan pembangunan juga harus diperhitungkan akan kemampuan pemerintah dalam melaksanakan kebijakan-kebijakan mengenai pembangunan yang ada.

Peran masyarakat pada umumnya tentu tidak akan lepas dari setiap pelaksanaan pembangunan karena tanggung jawab dalam pembangunan tidak semata-mata berada di tangan pemerintah saja, akan tetapi menjadi tanggung jawab masyarakat juga, sebab dalam hal ini masyarakat merupakan objek sekaligus subjek dari pada pembangunan tersebut. 1)

Berdasarkan hasil penelitian tentang kemampuan pemerintah dalam proses perencanaan kebijakan dalam pelaksanaan pembangunan para informan menjawab aparat pemerintah desa mampu dalam proses perencanaan kebijakan, menurut wawancara peneliti dengan bapak Muh. Arfan, ST selaku Kasubid Infrastruktur, berikut kutipan wawancaranya:

"kalau kata pemerintah Kecamatan Ulumanda sudah mantap kalau perencanaan, karena sudah banyak pembangunan yang mereka adakan". karena tidak mungkin tidak ada pembangunan tanpa ada rencana lebih dulu" (Wawancara 03 Mei 2021)

Melihat tingkat jawaban para informan di atas maka disimpulkan bahwa pemerintah sering mengimplementasikan kebijakan, ini disebabkan karena pemerintah melihat bahwa tingkat partisipasi masyarakat terhadap pelaksanaan pembangunan yang berada di wilayah kepemimpinannya yaitu di kecamatan Ulumanda berpartisipasi secara aktif dalam setiap pelaksanaan pembangunan.

Faktor-Faktor Penghambat dan Pendukung Dalam Pembangunan

Faktor-faktor penghambat yang dihadapi pemerintah daerah dalam pembangunan infrastruktur jalan yaitu dalam perencanaan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur jalan sebagai berikut:

1) Anggaran

Dalam penganggaran jalan walaupun dana sudah cair tapi terlebih dahulu harus dipilih melalui perencanaan dengan menentukan mana jalan yang harus terlebih dahulu dilakukan pembangunan karena anggaran yang diusulkan tidak sepenuhnya cair. Dampak dari keterbatasan anggaran ini membuat pencapaian target pembangunan jalan tidak maksimal seperti kurangnya sarana prasarana pendukung pembangunan jalan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Muhammad Irwan selaku Seksi pembangunan jalan, berikut kutipan wawancaranya :

"Hambatan itu dari anggaran, setiap tahun pemerintah daerah juga berupaya bagaimana selain anggaran dari daerah ada juga anggaran dari pusat kalau untuk jalan-jalan beton bisa pakai APBD tapi volumenya sedikit." (wawancara 02 Mei 2021)

2) Lokasi

Lokasi pembangunan bisa menjadi faktor pendukung dan sekaligus dapat menjadi faktor penghambat, dimana lokasi yang menjadi pendukung dalam pembangunan infrastruktur jalan yaitu apabila jalan kering dan tidak hujan akan mempermudah dalam melakukan pelaksanaan program pembangunan jalan, seperti pengerasan dan menimbun tanah, dengan jalan kering dan tidak terjadi hujan akan mempermudah pengerjaan jalan dan jalan yang baru di aspal atau di semen akan cepat mengeras. Dan lokasi yang menjadi penghambat dalam pembangunan infrastruktur jalan yaitu lokasi pembangunan yang tidak mendukung misalnya karena cuaca seperti hujan maka dapat menghambat pengerasan jalan.

Adapun Faktor-faktor pendukung dalam pembangunan infrastruktur jalan sebagai berikut:

1) Partisipasi masyarakat

Partisipasi masyarakat sangat penting dalam melakukan pembangunan, misalkan masyarakat yang memberi usulan pembangunan daerah dalam musyawarah perencanaan pembangunan yang dilakukan oleh masyarakat, dengan adanya usulan tersebut maka akan menjadi perencanaan yang kemudian dilakukan pengembangan pembangunan jalan karena pembangunan itu ditujukan kepada masyarakat agar pertumbuhan ekonomi masyarakat semakin berkembang dengan adanya pembangunan jalan, jadi masyarakat harus ikut berpartisipasi dalam pembangunan.

2) Jaringan informasi dan komunikasi

Salah satu faktor pendukung terlaksananya pembangunan di kecamatan Ulumanda yaitu jaringan informasi dan komunikasi yang dimana ketika ada suatu bentuk kerjasama baik itu secara external maupun internal maka hubungan komunikasi, konsolidasi dan kerjasama ini perlu di tingkatkan agar dapat mencapai hasil yang sangat maksimal terhadap pembangunan yang akan di laksanakan, sehingga tingkat kepuasan dari pembangunan itu dapat di rasakan oleh masyarakat yang ada di daerah-daerah tertentu seperti masyarakat yang ada di Kecamatan Ulumanda Kabupaten Majene.

3) Sumber daya manusia

Sumber daya manusia menjadi aspek yang sangat penting dalam setiap pengelolaan atau pengembangan suatu kebijakan, dalam Mengevaluasi kebijakan terhadap pembangunan infrastruktur wilayah tentunya aspek sumber daya manusia menjadi salah satu faktor pendukung terlaksananya evaluasi kebijakan tersebut, Pemerintah Kabupaten Majene dalam hal ini Dinas Pekerjaan Umum dan Camat Kecamatan Ulumanda dituntut menjalankan seluruh kebijakan dengan seluruh potensi sumber daya manusia yang ada.

4) Struktur birokrasi

Harus diakui bahwa birokrasi merupakan salah satu *stakeholder* pembangunan infrastruktur jalan dan karena itu memiliki peran yang strategis untuk menentukan arah dan sasaran pembangunan infrastruktur jalan. Peran ini semakin sentral karena dalam era otonomi daerah kewenangan di dalam perencanaan, kebijakan dan pengelolaan pembangunan diserahkan oleh pemerintah pusat kepada daerah. Implikasinya tentu saja sangat luas, terutama pada kesiapan birokrasi di daerah dalam mengimplementasikan kewenangan tersebut. Keberhasilan pembangunan infrastruktur di daerah Kecamatan pada akhirnya sangat tergantung pada kemampuan birokrasi di daerah untuk mengelola sumber dana terhadap pembangunan yang ada.

Pembahasan

Peranan pemerintah daerah sebagai koordinator, bilamana ditinjau dari tugas pokok dan fungsi pemerintah daerah sehingga kepala Administrasi Kabupaten adalah layanan desentralisasi pemerintah daerah untuk bertanggungjawab atas pelaksanaan, koordinasi dan dukungan semua kegiatan layanan pemerintah di tingkat kabupaten. Khususnya pelaksanaan, implementasi dan monitoring kebijakan pembangunan daerah yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Sejalan dengan ini pemerintah daerah menggunakan wewenang dan kompetensi untuk berperan sebagai koordinator untuk mengkoordinir semua kegiatan dan pekerjaan yang ada di daerah dan bagaimana menciptakan perubahan proses pembangunan Kecamatan Ulumanda Kabupaten Majene. Karena Kepala Daerah atau Bupati mempunyai komitmen sebagai pemimpin yang bermakna untuk berkoordinasi dan berorientasi kepada sektor-sektor/ lembaga pemerintahan.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pemerintah daerah Kabupaten Majene kecamatan Ulumanda telah menjalankan fungsi dan perannya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Hal tersebut dilihat dari peran Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Majene kecamatan Ulumanda dalam melakukan pembangunan jalan yang juga disesuaikan dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tahun 2018 yang dibuat oleh BAPPEDA mengarah kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) tahap ke dua (2018-2023) Kabupaten Majene kecamatan Ulumanda. Namun berdasarkan hasil penelitian melalui wawancara, masih ada beberapa indikator yang belum berjalan dengan maksimal, seperti ketergantungan dana dari pusat menyebabkan tidak tepatnya jadwal penyusunan Rencana Anggaran Pembangunan Daerah, karena penyusunan anggaran daerah bergantung kepada dana dari pusat. Hal tersebut menyebabkan masih sering terjadi keterlambatan dalam penyusunan APBD dalam pembangunan jalan. Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Majene kecamatan Ulumanda dapat meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat sehingga dapat mendukung terlaksananya peran pemerintah daerah yang baik dan kegiatan pembangunan khususnya pembangunan jalan dapat berjalan efektif, efisien dan tepat sasaran.

4. SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis empiris lapangan maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Peran pemerintah daerah dalam mewujudkan pembangunan infrastruktur jalan di kecamatan Ulumanda yaitu dalam perencanaan, pengalokasian, penganggaran, dan pengawasan sudah berjalan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Kemudian dilihat dari segi kemampuan pemerintah dalam menggerakkan partisipasi masyarakat sudah bisa dianggap mampu, karena sesuai dengan hasil jawaban dan informan, serta Faktor-faktor penghambat dan pendukung dalam pembangunan infrastruktur dilihat dari segi peranan pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan terdapat beberapa faktor penghambat seperti yang sudah disebutkan diatas sebelumnya, namun hal demikian masih dapat diantisipasi oleh pemerintah lewat motivasi yang disampaikan secara langsung serta melalui meningkatkan efektivitas kerja setiap aparatur yang ada di kecamatan Ulumanda.

DAFTAR PUSTAKA

- Abe Alexander, 2001, *Perencanaan Daerah Memperkuat Prakarsa Rakyat Dalam Otonomi Daerah*, Penerbit Laper Pustaka Utama Jakarta
- Adisasmita, R. (2006). *Pembangunan Pedesaan dan Perkotaan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Al-Ma'ruf, A. I. (2012). *Metode Penelitian*. Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Arifin, Z. (2009). *Evaluasi Pembelajaran*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Arifin, Z. (2012). *Penelitian Pendidikan Metode dan Paradigma Baru*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Bungin, B. (2003). *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Desty, C. N. (2014). *Pengaruh Infrastruktur Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kota sukabumi*. Bogor: Fakultas Ekonomi dan Manajemen, Instut Pertanian.
- Didit, P. (2009). *Fenomena Migrasi Tenaga Kerja dan Perannya bagi Pembangunan Daerah Asal*. Jurnal Ekonomi Pembangunan: Vol. 10, No.1, Juni 2009, hal. 84-102.
- Edi, S. (2007). *Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Jhingan. (2000). *Tujuan Pokok Pembangunan Ekonomi*. Jakarta: Jurnal Makro Ekonomi.
- Kuncoro, M. (2004). *Otonomi dan Pembangunan Daerah*. Jakarta: Erlangga.
- Liony Wijayanti, I. (2013). *Strategi peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Nelayan Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan*. Jurnal: Agriekonomika.
- Mulyadi, M. (2011). *Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Yogyakarta: Nadi Pustaka.
- Narwoko, J. D. (2010). *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan edisi ketiga*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Undang-Undang dasar (UUD) 1945
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang
Pemerintahan Daerah
Wikipedia 2018